

Kejaksaan Siap Beri Pendampingan Hukum Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Pasuruan

Selasa, 5 November 2024

Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan berkomitmen memberikan pendampingan hukum kepada guru dan tenaga kependidikan di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kejaksaan, Teguh Ananto, dalam sosialisasi mitigasi risiko hukum bagi tenaga pendidik. Menurutnya, guru berhak atas bantuan hukum dan perlindungan dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru.

Kejaksaan ingin memastikan guru dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan nyaman, mengingat kasus-kasus yang menjadikan guru sebagai korban belakangan ini. Kejaksaan siap memberikan layanan hukum kepada guru yang menghadapi permasalahan terkait profesinya, baik dalam bentuk edukasi maupun pendampingan langsung.

Pj. Bupati Pasuruan, Nurkholis, mengapresiasi inisiatif Kejaksaan. Ia menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi guru, mengingat peran vital mereka dalam mencetak generasi penerus bangsa. Nurkholis meyakinkan para guru bahwa hak mereka akan terus dilindungi, termasuk dalam hal mengambil tindakan disipliner terhadap anak didik yang melanggar aturan.

Nurkholis juga mengingatkan bahwa pemerintah telah menyiapkan aturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah untuk melindungi guru dalam menjalankan tugasnya. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 memberikan landasan hukum bagi guru untuk memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar norma.

Melalui sosialisasi dan pendampingan hukum, diharapkan para guru di Kabupaten Pasuruan dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan nyaman, sehingga dapat fokus dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.

